



Siswa KMS Pegang HP Daftar PPDB

Forpi Kota Jogja Menduga KSJPS Tak Tepat Sasaran

JOGIA - Hal yang dikhawatirkan banyak pihak menjadi temuan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja kemarin (1/7). Forpi mendapati orang tua calon siswa yang ditengarai dari keluarga mampu, namun mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 menggunakan kartu menuju se-

Sistem seleksi seperti KMS menggunakan ranking nilai. Karena (pendaftaranya, Red) melebihi kuota."

SITI ARINA BUDI ASTUTI,
Kepala Sekolah SMPN 15 Jogja

jahtera (KMS). Temuan itu di dua sekolah, yakni SMPN 4 dan SMPN 15.

Koordinator Forpi Jogja Baharud-

din Kamba menegaskan, KMS hanya berlaku bagi siswa dari keluarga miskin. Di SMPN 15 Kamba melihat beberapa calon siswa menggunakan *handphone* bermerek dengan harga relatif mahal.

Penasaran, Kamba pun menghampiri anak-anak itu. Kemudian bertanya jalur PPDB yang dipakai untuk mendaftar. Untuk memastikan apakah siswa tersebut juga mendaftar lewat jalur KMS.

"Ternyata benar, mereka pegang kartu KMS," ungkap priya

↳ Bocor Siswa... Hal 7

**KUOTA 10 %
JALUR KMS
SMPN KOTA JOGJA**

SMP N	Kuota	SMP N	Kuota
* SMP N 1	27	* SMP N 9	20
* SMP N 2	24	* SMP N 10	17
* SMP N 3	20	* SMP N 11	14
* SMP N 4	17	* SMP N 12	17
* SMP N 5	32	* SMP N 13	10
* SMP N 6	24	* SMP N 14	14
* SMP N 7	20	* SMP N 15	34
* SMP N 8	32	* SMP N 16	24

SISA KUOTA

Sisa kuota di beberapa sekolah dari jalur bibit unggul karena mengundurkan diri.

SMP N	Sisa Kuota	Sisa kuota diambilkan jalur bibit unggul 40% dari daya tampung SMP N di Kota Jogja.
* SMP N 3	11	
* SMP N 5	2	
* SMP N 6	1	
* SMP N 10	1	
* SMP N 13	1	
* SMP N 14	11	
* SMP N 15	16	

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

- **Din. Pendidikan** Yogyakarta,
 - **FORPI** Kepala
 Ttd

Siswa KMS Pegang HP

Daftar PPDB

Sambungan dari hal 1

Beda lagi hasil pantauannya di SMPN 4. Kamba melihat ada orang tua siswa yang mendaftar lewat jalur KMS datang ke sekolah mengendarai sepeda motor tipe terbaru. Motor itu berukuran cukup besar dan sedang *ngelits*.

"Naik N Max tapi daftarnya pakai KMS. Saya lihat saat orang itu keluar dari tempat parkir," kebernnya kepada *Radar Jogja*.

Terhadap temuannya itu Kamba akan menyampaikan kepada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Dia berharap ada tindak lanjut oleh panitia penyelenggara PPDB 2019 Kota Jogja. Sekaligus sebagai bahan evaluasi. Agar pendataan warga penerima KMS ke depan lebih jeli dan tepat sasaran. Se-

hingga tidak menimbulkan kecemburuan antarwarga.

"Sebagaimana PPDB tahun lalu, pendaftar jalur KMS membeludak karena siswa terkait mendapat prioritas utama diterima di sekolah tujuan. Di sisi lain, adanya pembagian persentase jalur pendaftaran PPDB selalu menimbulkan sisa kuota. Seperti juga terjadi pada PPDB tahun ini.

Pantauan Forpi Jogja menunjukkan beberapa sekolah mengalami sisa kuota dari jalur bibit unggul. Itu terjadi karena calon siswa mengundurkan diri. Sisa kuota itu lantas dialihkan ke jalur mutu yang berdaya tampung 40 persen dari total daya tampung sekolah.

Kamba merinci sekolah yang mengalami kuota sisa jalur bibit

unggul. Di antaranya, SMPN 3 Kota Jogja sisa kuota 11, SMPN 5 (2), SMPN 6 (1), SMPN 10 (1), SMPN 13 (1), SMPN 14 (11), dan SMPN 15 (16).

"Adanya kuota sisa itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Agar tidak terjadi lagi kekosongan kursi," pintanya.

Jika tidak disampaikan ke publik, Kamba khawatir akan terjadi 'siswa titipan' dari pihak tertentu, yang sejatinya tak lolos verifikasi.

Terpisah, Kasi Data dan Informasi Sosial, Dinas Sosial Kota Jogja Supriyanto mengungkapkan, warga pemegang KMS masuk daftar keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) 2018.

Proses pendataan KMS berpijak pada Keputusan Wali Kota Jogja

Nomor 510/KEP/2018 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan KSJPS Kota Jogja. Ada tujuh aspek dan 16 parameter yang wajib terpenuhi. Untuk menghitung bobot kelayakan seseorang berhak mendapatkan KMS.

Adapun tujuh aspek tersebut meliputi: pendapatan, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

KSJPS distratifikasi lagi menjadi tiga tingkatan KMS. KMS 3 kategori rentan miskin. Bobot nilainya 31-50. Lalu, KMS 2 kategori keluarga miskin. Bobotnya 51-75. Kemudian, KMS 1 kategori keluarga fakir miskin dengan bobot nilai 76-100.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 15 Kota Jogja Siti Arina

Budi Astuti mengatakan, daya tampung siswa baru pada tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 340 siswa. Dari jumlah tersebut 187 di antaranya masuk dalam zonasi mutu, luar daerah, dan KMS. Rinciannya kuota siswa jalur KMS 34 kursi, jalur luar daerah

(17), dan sisanya zonasi mutu.

Hingga kemarin siang 160 berkas pendaftaran telah dikembalikan orang tua calon siswa. Terdiri atas 10 calon siswa luar daerah, 43 jalur KMS, dan sisanya dari zonasi mutu.

"Sistem seleksi seperti KMS

menggunakan *ranking* nilai. Karena (pendaftarannya, Red) melebihi kuota," jelasnya.

Pelayanan PPDB dibuka hingga besok (3/7). Khusus pendaftaran *online* hari terakhir dibatasi hanya sampai pukul 10.00.

(cr15/dwi/yog/rg)



HARUS TEPAT SASARAN: Handphone telah menjadi alat komunikasi mahal bagi publik. Tak terkecuali anak usia sekolah. Forpi Kota Jogja menyoroti siswa ber-KMS yang memiliki handphone mahal.

Perlu Evaluasi Berjalan

ANGGOTA Komisi D DPRD Kota Jogja Dwi Budi Utomo mendesak pemerintah lebih selektif dalam penerbitan KMS. Ini guna menyikapi temuan Forpi. Terkait pendaftaran PPDB bagi calon siswa SMP dengan KMS.

Para pemegang KMS harus dipastikan bahwa mereka memang warga miskin. Agar tak terjadi penyelewengan KMS untuk kepentingan pendidikan. Di sisi lain masih ada warga yang justru membutuhkan KMS, tapi malah belum terfasilitasi.

"KMS itu ada standardisasinya. Setiap tahun ada revisi. Di sini peran dinas sosial harus digenjut sesuai dengan ketentuannya," ujar Budi



DOKUMEN PRIBADI
Dwi Budi Utomo

kemarin (1/7).

Selain verifikasi juga harus ada evaluasi berjalan. Berupa pemeriksaan berkala kepada para pemegang KMS. ▶ Baca Perlu... Hal 7

Perlu Evaluasi Berjalan

Sambungan dari hal 1

Sebab, tak menutup kemungkinan para pemegang KMS mengalami peningkatan kesejahteraan. Di tengah program KMS yang masih berjalan. Jika hal itu

terjadi, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk mencabutnya. "Selain peran aktif pemerintah, perlu ada kesadaran dari warga pemegang KMS," tegasnya.

Terkait pelaksanaan PPDB 2019,

Dwi menilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Terutama terkait penerapan zonasi. Khususnya fasilitas daerah yang masuk *blank spot area*.

Namun tak cukup itu saja. Program zonasi harus diikuti peme-

rataan infrastruktur pendidikan.

"Terpenting pemerataan kualitas tenaga pengajar. Maka semua sekolah jadi favorit. Baru lah sistem zonasi murni bisa diterapkan secara penuh," katanya. (dwi/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005